



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
SUB UNIT KERJA : BIDANG KEPEMUDAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARIBOWO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA
3. NHK : 221210

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 390.430.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m²/132 m² di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 180.620.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m²/45 m² di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 56.985.000
3. Tanah Seluas 599 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 95.840.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m²/45 m² di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 56.985.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 225.000.000

1. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TAFT JEEP Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
6. LAINNYA, ---(GENSET) MESIN LAINNYA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
7. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp.



1.500.000		
8. MOTOR, HONDA VARIO MATIC 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 18.000.000		
9. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT Tahun 2019, HASIL		
SENDIRI Rp. 140.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	51.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	119.198.278
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	786.528.278
III. HUTANG	Rp.	98.322.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	688.206.278

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.